

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah (Williamson)

Ketimpangan regional merupakan fenomena yang inheren dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk pada tingkat subnasional seperti antarwilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi (Nisa et al., 2025). Distribusi aktivitas ekonomi di berbagai wilayah tidak pernah terjadi secara merata, melainkan selalu diwarnai oleh adanya daerah-daerah yang berkembang lebih pesat dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini pada tahap awal pembangunan justru dianggap sebagai hal yang wajar, karena sumber daya produksi, investasi, dan tenaga kerja terampil secara alami akan bergerak menuju wilayah yang menawarkan produktivitas dan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi.

Williamson (1965) mengembangkan hipotesis kurva-U terbalik (*inverted-U hypothesis*) secara regional, menyatakan bahwa hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan ketimpangan antardaerah bersifat non-linear. Pada fase awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena investasi, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan komparatif, seperti ibu kota provinsi atau pusat-pusat industri (Nisa et al., 2025). Di Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi ini tercermin dari masih tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Palu dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang berada di wilayah pedalaman dan kepulauan, sehingga menciptakan disparitas pembangunan yang signifikan antar kabupaten/kota.

Ketimpangan antardaerah bukanlah kondisi yang bersifat permanen. Seiring dengan semakin matangnya perekonomian dan semakin efektifnya kebijakan redistribusi pemerintah, proses pemerataan pembangunan secara bertahap akan berlangsung melalui penyebaran aktivitas ekonomi ke daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Intervensi kebijakan berupa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah serta masuknya penanaman modal asing (PMA) ke berbagai kabupaten/kota menjadi instrumen strategis yang dapat mempercepat proses pemerataan, di wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam besar namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan yang nyata (Nisa et al., 2025). Williamson (1965) memperkenalkan suatu indeks pengukuran yang dikenal sebagai Indeks Williamson. Indeks ini mengukur derajat ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah dengan mempertimbangkan bobot jumlah penduduk masing-masing daerah terhadap total penduduk wilayah yang dianalisis, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan pengukuran ketimpangan sederhana.

2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal (Oates)

Menurut Oates (1972) dalam karyanya *Fiscal Federalism* meletakkan fondasi teoretis yang menjadi acuan utama dalam studi desentralisasi fiskal, khususnya mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem negara yang terdesentralisasi. Teori ini bertolak dari premis bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki fungsi dan kapasitas fiskal yang berbeda-beda, di mana pemerintah pusat umumnya memiliki kapasitas penerimaan yang jauh lebih besar dibandingkan pemerintah daerah, sementara kebutuhan belanja untuk penyediaan layanan publik justru sebagian besar berada di tingkat daerah (Triyono et al., 2021).

Transfer fiskal antarpemerintah (*intergovernmental fiscal transfers*) memiliki dua fungsi strategis yang saling melengkapi dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pertama, transfer fiskal berfungsi untuk mengatasi kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*), yaitu ketidakseimbangan antara kapasitas penerimaan pemerintah pusat yang relatif besar dengan kapasitas penerimaan pemerintah daerah yang umumnya terbatas. Kedua, transfer fiskal juga berperan dalam mereduksi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*), yakni perbedaan kapasitas keuangan yang signifikan di antara sesama pemerintah daerah akibat disparitas potensi sumber daya alam, basis pajak, maupun tingkat aktivitas ekonomi antardaerah. Kedua fungsi ini dijalankan melalui instrumen dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi sumber pembiayaan utama kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Triyono et al., 2021).

2.1.3 Teori Pertumbuhan (Solow dan Harrod Domar)

Menurut Harrod (1939) dan Domar (1946) secara independen mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang menekankan peran sentral akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Di provinsi Sulawesi Tengah, teori ini digunakan mengingat sebagian besar kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan modal domestik untuk membiayai pembangunan, sehingga kehadiran PMA menjadi sumber akumulasi modal eksternal yang strategis dalam mengisi kesenjangan tersebut. Semakin tinggi investasi yang masuk ke suatu daerah, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonominya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan antarwilayah (Maichal et al., 2024).

Solow (1956) memperluas dan menyempurnakan model Harrod-Domar dengan memperkenalkan faktor teknologi dan tenaga kerja sebagai variabel pertumbuhan yang tidak kalah penting dibandingkan akumulasi modal semata. Dalam model pertumbuhan neoklasik Solow, PMA tidak hanya berkontribusi melalui penambahan stok modal fisik, melalui transfer teknologi peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan kapasitas manajerial yang dibawa oleh investor asing ke daerah tujuan investasi (Maichal et al., 2024). Sehingga, dampak PMA terhadap perekonomian daerah bersifat multidimensional, mencakup efek langsung berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output, maupun efek tidak langsung berupa *spillover* teknologi yang dapat meningkatkan daya saing industri lokal.

Selain investasi asing, kerangka akumulasi modal ini juga berkaitan menjelaskan peran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam perekonomian daerah. PMDN pada dasarnya merupakan bentuk lain dari akumulasi modal fisik yang turut menambah kapasitas produksi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam model Harrod-Domar. Sumber modal PMDN berasal dari investor domestik yang umumnya lebih mempertimbangkan kedekatan lokasi dan pemanfaatan sumber daya lokal, berbeda dengan investor asing yang lebih berorientasi pada pasar global.

2.1.4 Teori Kumulatif Kausalitas (Myrdal)

Myrdal (1957) mengembangkan Teori Kumulatif Kausalitas sebagai kritik terhadap pandangan neoklasik yang berasumsi bahwa pasar secara alami akan menyeimbangkan pertumbuhan antardaerah. Myrdal berargumen bahwa ketimpangan antarwilayah justru cenderung menguat dalam jangka panjang karena pertumbuhan ekonomi di satu wilayah menciptakan daya tarik yang

semakin besar bagi faktor produksi untuk terus bergerak ke wilayah tersebut, bukan menyebar keluar (Sjafrizal, 2018).

Teori ini mengenal dua efek yang saling berlawanan. *Backwash effect* terjadi ketika modal, investasi baik asing maupun domestik tenaga kerja terampil mengalir dari daerah tertinggal menuju daerah yang lebih maju karena menawarkan imbal hasil lebih tinggi, sehingga kesenjangan antardaerah semakin melebar. Sebaliknya, *spread effect* adalah potensi penyebaran manfaat pertumbuhan ke wilayah sekitarnya melalui peningkatan permintaan dan perluasan jaringan ekonomi. Myrdal menegaskan bahwa di negara berkembang, *backwash effect* jauh lebih dominan dalam jangka pendek sehingga ketimpangan antardaerah bersifat persisten dan kumulatif (Sjafrizal, 2018).

Teori Myrdal menjelaskan arah pengaruh PMA dan PMDN terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah. Investasi yang masuk ke daerah dengan infrastruktur dan sumber daya alam yang lebih baik akan mempercepat pertumbuhan di daerah tersebut, sementara daerah lain yang tidak mendapat aliran investasi justru tertinggal. Proses ini menciptakan lingkaran kausal yang memperkuat dirinya sendiri dan memperlebar Indeks Williamson antarkabupaten/kota (Maichal et al., 2024). Fenomena tersebut tercermin di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana realisasi PMA sangat terkonsentrasi di Kabupaten Morowali melalui kawasan industri pengolahan nikel, sementara sebagian besar kabupaten lainnya hampir tidak mendapat aliran investasi asing. Pola serupa terjadi pada PMDN meskipun distribusinya sedikit lebih merata.

Berdasarkan kerangka Myrdal, konsentrasi investasi memperlebar kesenjangan PDRB per kapita antardaerah dalam jangka pendek melalui dominasi *backwash effect* (Syaifudin et al., 2024). Namun Myrdal juga mengakui bahwa

spread effect dapat menguat seiring waktu apabila investasi yang terakumulasi di satu wilayah mulai menciptakan permintaan dan keterkaitan ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Hal ini menjadi landasan teoritis yang menjelaskan mengapa dalam jangka panjang PMA dan PMDN berpotensi mengurangi ketimpangan antardaerah. Dengan demikian, teori kumulatif kausalitas Myrdal menjadi fondasi teoritis yang menjelaskan arah pengaruh PMA dan PMDN terhadap ketimpangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.5 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan kondisi perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan, output ekonomi, maupun kualitas pelayanan publik di antara daerah-daerah dalam satu wilayah provinsi. Menurut Williamson (1965), ketimpangan antardaerah mencerminkan ketidakmerataan distribusi manfaat pembangunan yang diukur dari perbedaan PDRB per kapita antardaerah secara tertimbang sesuai proporsi penduduk. Ketimpangan dapat timbul dari berbagai faktor, di antaranya perbedaan potensi sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur konektivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya akses layanan keuangan.

Ketimpangan pembangunan antardaerah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dimensinya. Pertama, ketimpangan pendapatan, yaitu perbedaan PDRB per kapita antardaerah yang mencerminkan kesenjangan produktivitas ekonomi. Kedua, ketimpangan fiskal, yaitu perbedaan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, ketimpangan sektoral, yaitu konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor atau industri tertentu yang hanya tersebar di wilayah terbatas. Di Provinsi Sulawesi Tengah, ketiga jenis ketimpangan ini hadir secara bersamaan,

tercermin dari dominasi ekonomi Kabupaten Morowali yang didorong sektor hilirisasi nikel sementara sebagian besar kabupaten lain masih bergantung pada sektor primer bernilai tambah rendah (Maichal et al., 2024).

Ketimpangan antardaerah bukanlah kondisi yang bersifat permanen. Williamson (1965) melalui hipotesis kurva-U terbalik (*inverted-U hypothesis*) menyatakan bahwa hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan ketimpangan antardaerah bersifat non-linear. Pada fase awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena investasi, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan komparatif. Seiring dengan semakin matangnya perekonomian dan semakin efektifnya kebijakan redistribusi pemerintah, proses pemerataan pembangunan secara bertahap akan berlangsung melalui penyebaran aktivitas ekonomi ke daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Penelitian Sahrul *et al.* (2026) menegaskan bahwa sifat ketimpangan antardaerah yang persisten ini menyebabkan kondisi ketimpangan pada periode sebelumnya berpengaruh terhadap kondisi periode berikutnya, sehingga dibutuhkan kebijakan struktural jangka panjang untuk menekan disparitas secara berkelanjutan.

Pengukuran ketimpangan dalam penelitian ini menggunakan Indeks Williamson karena kemampuannya menangkap disparitas PDRB per kapita secara tertimbang berdasarkan proporsi penduduk, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan pengukuran ketimpangan sederhana. Secara statistik, Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{N}\right)}}{y} \quad 0 < IW < 1$$

Keterangan :

IW: Indeks Williamson

y_i : PDRB per kapita daerah i

y : PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i : Jumlah penduduk daerah i

N : Jumlah penduduk seluruh daerah

Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara tertimbang (*weighted*) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan negara atau daerah lainnya. Kriteria interpretasi nilai Indeks Williamson secara lengkap dapat dirinci sebagai berikut:

- a. $IW = 0,00 - 0,20$: Ketimpangan sangat rendah (pembangunan antardaerah sangat merata)
- b. $IW = 0,21 - 0,35$: Ketimpangan rendah (kesenjangan antardaerah masih dalam batas wajar)
- c. $IW = 0,36 - 0,50$: Ketimpangan sedang (diperlukan intervensi kebijakan untuk pemerataan)
- d. $IW = 0,51 - 0,70$: Ketimpangan tinggi (kesenjangan antardaerah cukup signifikan)
- e. $IW > 0,70$: Ketimpangan sangat tinggi (disparitas pembangunan antardaerah sangat besar)

2.1.6 Transfer Fiskal

Transfer fiskal merupakan instrumen kebijakan desentralisasi keuangan yang digunakan pemerintah pusat untuk mendistribusikan sumber daya ke

pemerintah daerah. Transfer fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Transfer fiskal diberikan karena tidak semua daerah memiliki kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kedua, dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketiga, dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai aktivitas khusus yang merupakan urusan daerah.

Transfer fiskal berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik di tingkat daerah. Transfer fiskal hadir untuk memutus lingkaran kemiskinan fiskal dengan menyalurkan sumber daya keuangan secara redistributif dari daerah yang memiliki surplus fiskal ke daerah yang mengalami defisit fiskal (Ridho & Wijayanti, 2022). Dalam penelitian ini, transfer fiskal diukur melalui total realisasi dana perimbangan yang diterima masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang mencakup DBH, DAU, dan DAK.

$$\text{Transfer Fiskal} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

2.1.7 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai kegiatan menanamkan modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik sepenuhnya menggunakan modal asing maupun melalui kemitraan dengan penanam modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk aliran modal internasional yang membawa serta transfer teknologi, keahlian manajerial, dan akses ke jaringan perdagangan global.

Arus modal asing merupakan instrumen penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (Jhingan, 2016). Investasi asing berkontribusi dalam mendorong industrialisasi, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Selain menyediakan modal finansial, masuknya investasi asing disertai dengan transfer keahlian teknis yang diperlukan untuk membuka wilayah terpencil serta mengoptimalkan sumber daya baru. Di Sulawesi Tengah, masuknya PMA di sektor industri pengolahan nikel telah memberikan dampak pertumbuhan yang signifikan, namun bersifat terkonsentrasi secara spasial di Kabupaten Morowali. Dalam penelitian ini, PMA diukur dari realisasi nilai investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) yang diterima masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam satuan miliar rupiah selama periode 2017-2025, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2.1.8 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN merupakan instrumen investasi domestik yang memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mobilisasi sumber daya modal lokal, penguatan sektor-sektor produktif berbasis keunggulan komparatif daerah, serta penciptaan lapangan kerja yang berakar pada kondisi sosial-ekonomi lokal.

PMA dan PMDN memiliki karakteristik yang berbeda, dampaknya terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah. Secara teoritis, PMDN cenderung lebih berorientasi pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan (*linkage*) lebih erat dengan perekonomian lokal, sehingga potensi efek multiplier dan spillover-nya terhadap masyarakat sekitar lebih besar. Namun demikian, distribusi PMDN juga tidak selalu merata antarwilayah, karena investor domestik juga cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur memadai, kepastian hukum yang baik, dan akses pasar yang lebih luas (Nadzir & Kenda, 2023).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi PMDN di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri berbasis sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, distribusi PMDN antarkabupaten/kota juga menunjukkan pola yang tidak merata, di mana kabupaten-kabupaten dengan basis infrastruktur dan sumber daya alam yang lebih kuat cenderung menerima aliran PMDN yang lebih besar.

Jenis-jenis PMDN berdasarkan sektor meliputi: (1) Investasi di sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan; (2) Investasi di sektor sekunder seperti industri pengolahan dan manufaktur; (3) Investasi di sektor tersier seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata. Di Sulawesi Tengah, PMDN di sektor

pertambangan dan industri pengolahan mendominasi realisasi investasi domestik, terutama di kabupaten-kabupaten yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar seperti Banggai, Morowali, dan Morowali Utara.

Faktor-faktor yang memengaruhi arus PMDN antara lain: kondisi infrastruktur daerah, tingkat kepastian hukum dan kemudahan berusaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, potensi pasar lokal dan regional, serta insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Perbedaan kondisi antarwilayah dalam hal faktor-faktor tersebut menciptakan disparitas dalam penerimaan PMDN antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada gilirannya berkontribusi pada pola ketimpangan pembangunan yang ada.

Hubungan antara PMDN dan ketimpangan pembangunan bersifat ambigu secara teoritis. Di satu sisi, PMDN yang terdistribusi merata ke kabupaten-kabupaten tertinggal dapat mendorong proses konvergensi pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan. Di sisi lain, apabila PMDN terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju, maka investasi domestik justru dapat memperkuat pola ketimpangan yang ada. Pengujian empiris mengenai arah dan besaran pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pembangunan di Sulawesi Tengah menjadi penting untuk dilakukan, terutama dengan menggunakan pendekatan GMM yang mampu mengendalikan masalah endogenitas.

2.1.9 Hubungan Transfer Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Transfer fiskal merupakan instrumen desentralisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah melalui mekanisme distribusi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desain transfer yang efektif dapat memperkecil kesenjangan fiskal vertikal maupun *horizontal*, sehingga daerah dengan kapasitas keuangan rendah memperoleh ruang yang lebih besar

untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur (Ridho & Wijayanti, 2022). Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota sering muncul akibat perbedaan kemampuan pendanaan daerah, sehingga keberadaan transfer fiskal menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pemerataan pembangunan.

Peningkatan alokasi transfer fiskal akan mendorong kenaikan belanja pemerintah daerah (ΔG) yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat dan aktivitas ekonomi regional. Dampak tersebut berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah (ΔY), yang mencerminkan adanya efek pengganda fiskal pada tingkat subnasional. Desentralisasi fiskal yang disertai tata kelola yang baik terbukti dapat memperkuat pertumbuhan inklusif dan mempersempit kesenjangan regional (Iqbal & Woyanti, 2025). Dengan demikian, efektivitas pemanfaatan transfer fiskal menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan dampak pengganda terhadap perekonomian daerah.

Hubungan antara transfer fiskal dan ketimpangan juga dipengaruhi oleh kualitas institusi serta kapasitas administrasi pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mengurangi disparitas wilayah apabila disertai mekanisme pengawasan dan distribusi yang proporsional, namun dapat memperbesar ketimpangan apabila kapasitas daerah berbeda jauh dan sebagian besar alokasi terserap untuk belanja yang kurang produktif (Arrosyid & Bawono, 2025).

Secara keseluruhan, transfer fiskal memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah artinya, semakin besar dan tepat sasaran alokasi transfer fiskal, semakin kecil kesenjangan pembangunan antarkabupaten/kota. Ridho & Wijayanti (2022) menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara

Nisa *et al.* (2025) mengkonfirmasi bahwa dana perimbangan secara keseluruhan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 34 provinsi Indonesia. Hasil serupa ditemukan oleh Aprilina (2021) meskipun dengan tingkat signifikansi yang lebih lemah, menunjukkan bahwa efektivitas transfer fiskal sangat bergantung pada kualitas pengelolaan belanja daerah. Dengan demikian, transfer fiskal menjadi instrumen kebijakan yang krusial dalam upaya mempersempit ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.10 Hubungan Penanaman Modal Asing Terhadap Ketimpangan

Pembangunan

Penanaman Modal Asing (PMA) berperan sebagai sumber pembiayaan eksternal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah melalui akumulasi modal, transfer teknologi, dan peningkatan efisiensi manajerial. Aliran investasi asing berkontribusi terhadap pertumbuhan output dan penciptaan lapangan kerja di wilayah penerima investasi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Kenaikan investasi asing akan meningkatkan output daerah (ΔY) melalui ekspansi sektor-sektor produktif. Dampak lanjutan berupa peningkatan pendapatan masyarakat dapat mendorong konsumsi dan memperluas kegiatan ekonomi lainnya, sehingga tercipta efek pengganda pada perekonomian regional. Studi empiris menunjukkan bahwa FDI memiliki hubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya terhadap ketimpangan bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kebijakan daerah. Apabila PMA terdistribusi merata, maka pertumbuhan yang dihasilkan berpotensi mengurangi kesenjangan antarwilayah (Triyono *et al.*, 2021).

Konsentrasi PMA pada wilayah yang telah maju dapat memperbesar disparitas pembangunan. Investasi asing cenderung mengalir ke daerah dengan infrastruktur memadai dan pasar yang lebih besar, sehingga wilayah tertinggal berisiko tidak memperoleh manfaat yang sama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa FDI dapat meningkatkan atau menurunkan ketimpangan tergantung pada karakteristik institusi dan tingkat pembangunan awal suatu daerah (Suryahani et al., 2018). Kondisi ini sejalan dengan *backwash effect* dalam teori kumulatif kausalitas Myrdal (1957), yang menyatakan bahwa investasi yang terkonsentrasi di satu wilayah justru menarik sumber daya produktif dari daerah sekitarnya, sehingga ketimpangan antardaerah cenderung semakin melebar. Fenomena konsentrasi investasi ini tergambar di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana arus masuk PMA selama periode 2017-2025 didominasi oleh sektor industri pengolahan nikel yang terkonsentrasi di Kabupaten Morowali, khususnya melalui keberadaan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Morowali mencatat realisasi PMA yang jauh melampaui kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Tengah, sehingga menciptakan *fenomena enclave economy* pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di satu titik geografis namun tidak menyebar secara merata ke wilayah sekitarnya. Kabupaten-kabupaten seperti Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, dan Sigi justru mengalami stagnasi dalam penerimaan PMA akibat keterbatasan infrastruktur, jauhnya jarak dari pusat logistik, serta rendahnya daya tarik investasi sektoral di wilayah tersebut.

Polarisasi investasi yang demikian tajam ini secara langsung berkontribusi pada melebarnya Indeks Williamson antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah, mengingat kesenjangan PDRB per kapita antara Morowali dengan kabupaten-

kabupaten tertinggal semakin membesar seiring meningkatnya intensitas aktivitas industri nikel. Oleh sebab itu, efektivitas PMA dalam mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana distribusi lokasi investasi dapat menjangkau kabupaten-kabupaten yang selama ini tertinggal, serta seberapa efektif kebijakan daerah dalam membangun keterkaitan (*linkage*) antara sektor industri berbasis PMA dengan perekonomian lokal di sekitarnya (Maichal et al., 2024).

2.1.11 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara teoritis memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah dibandingkan PMA, karena investasi domestik cenderung memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan struktur ekonomi lokal dan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya domestik. Namun demikian, distribusi PMDN juga tidak selalu merata. Studi empiris di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa PMDN dapat memiliki dampak yang beragam terhadap ketimpangan regional tergantung pada pola distribusi sektoral dan geografisnya.

Apabila PMDN terdistribusi ke kabupaten-kabupaten yang selama ini tertinggal, maka investasi domestik dapat menjadi katalis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan mendorong proses konvergensi antardaerah. Sebaliknya, apabila PMDN terkonsentrasi di wilayah yang sudah memiliki basis ekonomi yang kuat, maka investasi domestik justru dapat memperkuat pola ketimpangan yang ada. Nadzir & Kenda (2023) menemukan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang secara implisit menunjukkan bahwa

distribusi PMDN yang tidak merata berpotensi memperbesar perbedaan tingkat pertumbuhan antardaerah. Kecenderungan ini selaras dengan *backwash effect* Myrdal (1957), di mana investasi domestik yang mengalir ke wilayah dengan infrastruktur lebih baik justru memperkuat pola ketimpangan dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka panjang *spread effect* berpotensi mendorong konvergensi antardaerah. Di wilayah Sulawesi Tengah, PMDN yang terkonsentrasi di sektor pertambangan dan industri pengolahan di beberapa kabupaten tertentu berpotensi memperlebar kesenjangan dengan kabupaten-kabupaten yang ekonominya masih didominasi sektor pertanian dan perikanan.

Peningkatan realisasi PMDN pada dasarnya akan mendorong kenaikan output daerah (ΔY) melalui perluasan kapasitas produksi pada sektor-sektor yang menjadi sasaran investasi, terutama pertambangan dan industri pengolahan yang mendominasi Sulawesi Tengah. Kondisi ini kemudian berlanjut pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya dapat memicu efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah penerima investasi. Meski demikian, mengingat PMDN cenderung terpusat pada kabupaten/kota yang infrastruktur dan basis sumber dayanya sudah lebih mapan, efek pengganda tersebut pun lebih banyak dinikmati oleh daerah-daerah yang memang sudah maju. Sehingga memperkecil kesenjangan, kondisi ini justru berisiko memperlebar kesenjangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota.

Berbeda dengan PMA yang datang bersama jaringan pasar dan rantai pasok lintas wilayah sehingga manfaatnya cenderung lebih cepat menyebar melalui mekanisme *spillover*, investor domestik pada PMDN umumnya bergerak dalam skala rantai pasok yang lebih terbatas dan sangat bergantung pada kedekatan geografis dengan basis produksinya. Karakteristik semacam ini membuat

backwash effect dalam kerangka Myrdal (1957) menjadi lebih persisten pada PMDN dibandingkan PMA, sebab investasi domestik yang sudah terkonsentrasi di suatu wilayah cenderung menarik investasi domestik lanjutan ke wilayah yang sama (*self-reinforcing concentration*), bukan menyebar ke kabupaten/kota di sekitarnya. Kondisi inilah yang menjadi dasar teoritis untuk menduga bahwa pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota cenderung bersifat positif dan konsisten, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penting yang dilakukan peneliti untuk memperoleh bahan perbandingan, memperluas wawasan, serta memahami perkembangan kajian dalam bidang yang sama. Melalui penelaahan berbagai hasil penelitian yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka, sekaligus memperkuat landasan teoritis dan memperjelas arah penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai dasar perbandingan dan identifikasi celah penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Iqbal & Woyanti (2025) Peran Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa	Regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) pada 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2013-2022 (60 observasi).	X1: Desentralisasi Fiskal X2: Infrastruktur Jalan X3: Infrastruktur Sanitasi X4: Infrastruktur Listrik Y: Indeks Gini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. Infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Infrastruktur jalan dan listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.
2	Ridho & Wijayanti (2022) Analisis pengaruh dana alokasi umum ,dana alokasi khusus ,dana bagi hasil pajak ,dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia	Regresi data panel pada 34 provinsi di Indonesia periode 2015–2020.	X1: Dana Alokasi Umum (DAU) X2: Dana Alokasi Khusus (DAK) X3: Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) X4: Pertumbuhan Ekonomi Y: Ketimpangan Pendapatan (Gini)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.
3	Nisa <i>et al.</i> (2025) Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah di 34 Provinsi Indonesia	Regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) pada 34 provinsi Indonesia periode 2014-2023.	X1: Dana Perimbangan (DP) X2: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) X3: Foreign Direct Investment (FDI) Y: Ketimpangan Pembangunan (Indeks Jaime Bonet)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Foreign direct investment (FDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.
4	Triyono <i>et al.</i> (2021) The	Path Analysis	X1: Desentralisasi Fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian terdahulu (2026)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
	Effect of Fiscal Decentralization and Foreign Direct Investment on Regional Income Inequality : Economic Growth as A Mediating Variable	(Analisis Jalur) pada 34 provinsi Indonesia periode 2015-2019 (161 observasi).	X2: Foreign Direct Investment (FDI) Z: Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Y: Ketimpangan Pendapatan (Gini)	desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Foreign direct investment (FDI) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.
5	Maichal <i>et al.</i> (2024) The Influence of Gross Regional Domestic Product Per Capita and Foreign Direct Investment on Income Inequality : An Empirical Study of 34 Provinces in Indonesia	Regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) pada 34 provinsi Indonesia periode 2015-2023.	X1: GRDP Per Kapita X2: Foreign Direct Investment (FDI) Y: Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Foreign direct investment (FDI) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita dan investasi asing cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.
6	Juliansyah <i>et al.</i> (2022) Fiscal Decentralization and Income Inequality: A Prediction Using the SEM Model	Structural Equation Modeling (SEM) pada data panel kabupaten/kota di Indonesia	X1: Desentralisasi Fiskal X2: Pertumbuhan Ekonomi Y: Ketimpangan Pendapatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian terdahulu (2026)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
7	Azim <i>et al.</i> (2022) Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi di Indonesia	Regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) pada 34 provinsi Indonesia. Menggunakan Indeks Jaime Bonet sebagai proksi ketimpangan pembangunan	X1: Foreign Direct Investment (FDI) X2: Dana Perimbangan X3: Infrastruktur Y: Ketimpangan Pembangunan (Indeks Jaime Bonet)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah.
8	Nurchayyo <i>et al.</i> (2020) Pengaruh Investasi Swasta dan Transfer Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t	X1: Investasi Swasta X2: Transfer Fiskal Y: Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tersebut memengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian terdahulu (2026)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
9	Nadzir & Kenda, (2023) Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri: Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Regresi data panel pada 34 provinsi di Indonesia menggunakan Fixed Effect Model (FEM).	X1: Foreign Direct Investment (FDI) X2: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Y: Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara simultan, investasi asing dan investasi dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
10	Syaifudin <i>et al.</i> (2024) Determinan Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2012–2022: Pendekatan Analisis Panel Dinamis	Generalized Method of Moments (GMM) — FD-GMM dan SYS-GMM pada 33 provinsi Indonesia periode 2012–2022	X1: PMDN X2: PMA X3: IPM X4: Aglomerasi X5: Kemiskinan Y: Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. PMA berpengaruh negatif signifikan. IPM berpengaruh positif signifikan. Aglomerasi dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan. Model terbaik adalah SYS-GMM.

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian terdahulu (2026)

Penelitian Iqbal & Woyanti (2025) menganalisis peran desentralisasi fiskal dan pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa menggunakan *Fixed Effect Model* pada enam provinsi periode 2013–2022. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah cakupan wilayah dan pendekatan analisis, di mana penelitian ini berfokus pada ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan GMM untuk menangani endogenitas dalam data panel dinamis, serta memasukkan PMA dan PMDN sebagai variabel independen selain transfer fiskal. Persamaannya adalah penggunaan variabel transfer fiskal sebagai faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah.

Penelitian Ridho & Wijayanti (2022) menganalisis pengaruh DAU, DAK, DBH, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan menggunakan data panel 34 provinsi Indonesia periode 2015–2020. Perbedaan utama adalah level analisis antarkabupaten/kota dalam satu provinsi yang menangkap variasi ketimpangan lebih halus, penggunaan GMM yang lebih robust, serta penambahan variabel PMA dan PMDN. Persamaannya adalah penggunaan komponen transfer fiskal berupa DAU, DAK, dan DBH sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap ketimpangan.

Penelitian Nisa *et al.* (2025) menganalisis ketimpangan pembangunan di 34 provinsi Indonesia menggunakan *Fixed Effect Model* dengan variabel dana perimbangan, TPAK, dan FDI periode 2014–2023. Perbedaan utama adalah penggunaan GMM, Indeks Williamson sebagai proksi ketimpangan, penambahan PMDN, serta data antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Persamaannya adalah analisis dampak transfer fiskal dan FDI terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian Triyono *et al.* (2021) menggunakan Path Analysis untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan FDI terhadap ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pada 34 provinsi Indonesia periode 2015-2019. Perbedaan utama adalah penggunaan GMM, Indeks Williamson antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebagai variabel dependen, serta penambahan variabel PMDN tanpa variabel mediasi. Persamaannya adalah analisis hubungan antara desentralisasi fiskal, investasi asing, dan ketimpangan pembangunan antardaerah.

Penelitian Maichal *et al.* (2024) menganalisis pengaruh PDRB per kapita dan FDI terhadap ketimpangan menggunakan *Fixed Effect Model* pada 34 provinsi periode 2015-2023. Perbedaan utama adalah penggunaan transfer fiskal sebagai variabel independen utama, penambahan PMDN, serta penggunaan GMM untuk menangani endogenitas dan fokus analisis antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Persamaannya adalah analisis dampak FDI terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia.

Penelitian Juliansyah *et al.* (2022) menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) pada data panel kabupaten/kota di Indonesia, dengan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada metode analisis, di mana penelitian ini menggunakan GMM yang lebih mampu menangani masalah endogenitas dan dinamika data panel, serta memasukkan PMA dan PMDN sebagai variabel independen yang tidak dianalisis dalam penelitian tersebut. Persamaannya adalah analisis pengaruh komponen desentralisasi fiskal,

khususnya DAK dan DBH, terhadap ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia.

Penelitian Azim *et al.* (2022) menggunakan *Fixed Effect Model* untuk menganalisis determinan ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia dengan variabel FDI, dana perimbangan, dan infrastruktur. Perbedaan utama adalah penggunaan Indeks Williamson antarkabupaten/kota sebagai variabel dependen, penambahan PMDN, dan penggunaan GMM. Persamaannya adalah analisis pengaruh FDI dan dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia.

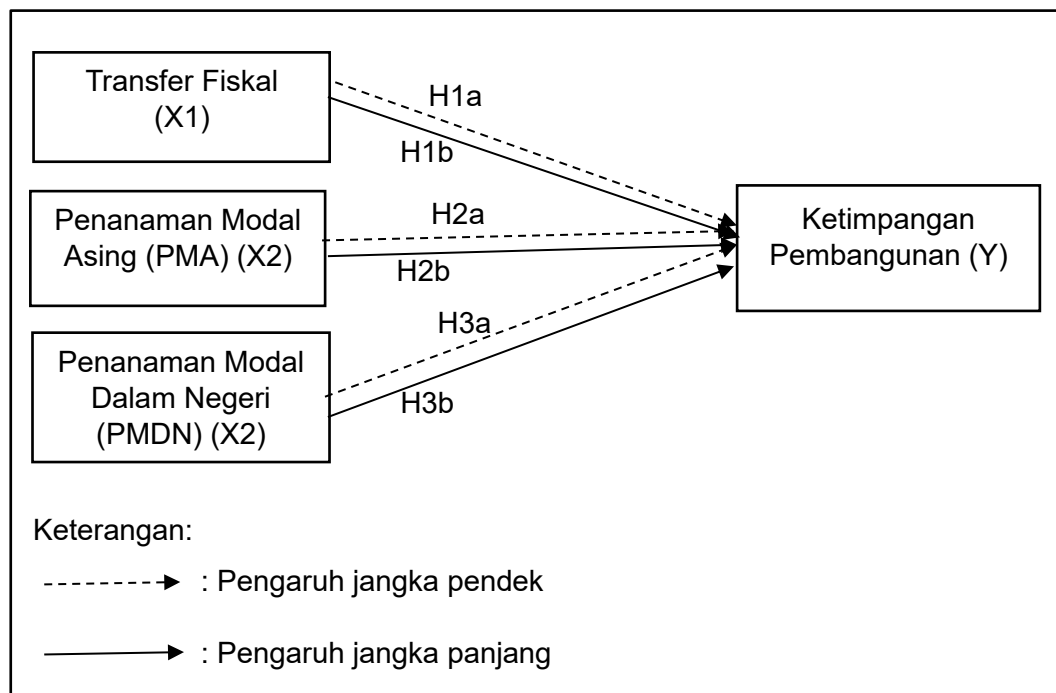
Penelitian Nurcahyo *et al.* (2020) menganalisis pengaruh investasi swasta dan transfer fiskal terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota di Kalimantan Timur menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan utama adalah fokus penelitian ini pada Provinsi Sulawesi Tengah dengan metode GMM yang lebih canggih, serta pemisahan investasi menjadi PMA dan PMDN untuk gambaran yang lebih spesifik. Persamaannya adalah analisis dampak transfer fiskal dan investasi secara bersamaan terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota di tingkat provinsi.

Penelitian Nadzir & Kenda (2023) menggunakan *Fixed Effect Model* untuk menganalisis pengaruh FDI dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di 34 provinsi Indonesia. Perbedaan utama adalah penggunaan Indeks Williamson antarkabupaten/kota sebagai variabel dependen, penambahan transfer fiskal, penggunaan GMM, serta unit analisis kabupaten/kota yang lebih mikro dan kontekstual. Persamaannya adalah analisis pengaruh PMA dan PMDN secara terpisah terhadap ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia.

Penelitian Syaifudin *et al.* (2024) menganalisis determinan ketimpangan wilayah di 33 provinsi Indonesia periode 2012-2022 menggunakan metode GMM (FD-GMM dan SYS-GMM) dengan variabel PMDN, PMA, IPM, aglomerasi, dan kemiskinan terhadap ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah cakupan analisis yang berfokus pada ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penggunaan variabel transfer fiskal yang tidak ada dalam penelitian tersebut, serta periode yang lebih mutakhir 2017-2025. Persamaannya adalah penggunaan metode GMM, variabel PMA dan PMDN sebagai determinan ketimpangan, serta pengukuran ketimpangan menggunakan Indeks Williamson.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti (Sjafrizal, 2018). Kerangka konseptual pada penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel independen berupa transfer fiskal (diproksikan melalui total realisasi dana perimbangan: $DAU + DAK + DBH$), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Berdasarkan landasan teori dan hubungan antarvariabel yang telah dijelaskan, kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah, 2026

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan awal yang hendak diuji kebenarannya melalui analisis data empiris sebagai tanggapan terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian statistik (Ismanto & Pebruary, 2021). Sesuai kerangka konseptual, setiap hipotesis dibedakan menjadi pengaruh jangka pendek (Ha) dan jangka panjang (Hb). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Transfer Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hipotesis bahwa transfer fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Teori desentralisasi fiskal Oates (1972) menyatakan bahwa transfer fiskal berfungsi sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal antardaerah sehingga disparitas pembangunan dapat dipersempit. Dalam jangka pendek, peningkatan transfer fiskal langsung mendorong kenaikan belanja daerah yang menstimulasi permintaan agregat dan aktivitas ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, alokasi yang konsisten ke daerah tertinggal mendorong akumulasi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang secara struktural mengurangi ketimpangan. Ridho & Wijayanti (2022) menemukan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan Nisa *et al.* (2025) mengkonfirmasi dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan di 34 provinsi Indonesia. Dengan demikian, hipotesis 1 penelitian ini adalah:

H1a : Transfer fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka pendek.

H1b : Transfer fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hipotesis bahwa PMA berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota. Teori kumulatif kausalitas Myrdal (1957) menyatakan bahwa investasi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu menciptakan *backwash effect*

yang menarik sumber daya dari daerah tertinggal, sehingga cenderung memperlebar kesenjangan antarwilayah. Dalam jangka pendek, masuknya PMA langsung meningkatkan output dan PDRB per kapita di daerah penerima sehingga perbedaan output antarkabupaten/kota melebar. Dalam jangka panjang, konsentrasi PMA memperkuat efek aglomerasi dan memperbesar disparitas PDRB per kapita secara struktural. Penelitian Maichal *et al.* (2024) dan Azim *et al.* (2022) menemukan FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antarprovinsi di Indonesia. Meskipun Syaifudin *et al.* (2024) menemukan PMA berpengaruh negatif secara nasional, pola konsentrasi PMA di satu kabupaten (Morowali) di Sulawesi Tengah memperkuat dugaan arah pengaruh positif terhadap ketimpangan antarkabupaten/kota. Dengan demikian, hipotesis 2 penelitian ini adalah:

H2a : Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka pendek.

H2b : Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hipotesis bahwa PMDN berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota. Teori kumulatif kausalitas Myrdal (1957) menyatakan bahwa investasi domestik yang terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur lebih baik

akan menciptakan *backwash effect* dalam jangka pendek yang memperlebar kesenjangan dengan wilayah tertinggal, meskipun dalam jangka panjang *spread effect* berpotensi mendorong konvergensi antardaerah. Dalam jangka pendek, PMDN yang mengalir ke daerah dengan infrastruktur lebih baik langsung meningkatkan output daerah tersebut sehingga perbedaan PDRB per kapita antarkabupaten/kota membesar. Dalam jangka panjang, akumulasi PMDN yang terkonsentrasi di wilayah tertentu memperkuat basis industri secara struktural sehingga kesenjangan dengan kabupaten berbasis pertanian tradisional semakin melebar. Syaifudin *et al.* (2024) dengan metode GMM menemukan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia, mendukung teori Myrdal bahwa investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah maju. Penelitian Nadzir & Kenda, (2023) juga menemukan PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan distribusi tidak merata berpotensi memperbesar perbedaan laju pertumbuhan antarkabupaten/kota. Dengan demikian, hipotesis 3 penelitian ini adalah:

H3a : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka pendek.

H3b : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.